

Anggarkan Rp11 M untuk Amankan Aset



AKSI DAMAI - Ratusan buruh menggelar aksi untuk memperingati Hari Buruh di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Rabu (1/5).

Buruh Minta Gubernur DIY Sediakan Rumah Murah

YOGYA, TRIBUN - Buruh meminta Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk menyediakan rumah murah, sebagai solusi upah murah di wilayah DIY. Hal tersebut disampaikan ratusan buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (MPBI DIY), bertepatan momen Hari Buruh di Tugu Pal Putih-Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Rabu (1/5).

Koordinator MPBI DIY, Irsad Ade Irawan, mengatakan, tuntutan lainnya yang diuraikan dalam peringatan Hari Buruh kali ini ialah penyediaan transportasi yang khususkan untuk para buruh.

"Kami mendesak kepada Pemda DIY sebagai akibat dari adanya upah murah, maka Pemda DIY harus melakukan pembangunan perumahan untuk buruh. Upah minimum tidak bisa untuk beli rumah," ujar Irsad.

Terkait transportasi untuk buruh, Irsad mengatakan hal tersebut dapat diupayakan dengan memanfaatkan bus Trans Jogja yang diatur rutanya melintasi kawasan pabrik. Lebih lanjut Irsad mengatakan, tuntutan lainnya ialah mem-

berikan diskon pada anggota serikat buruh, serta mendorong Pemda DIY untuk melakukan penguatan agar buruh mendapatkan pendapatan di luar upah yaitu melalui koperasi.

Disinggung terkait UMK, Irsad mengatakan bahwa MPBI DIY berharap agar Pemda DIY juga memperhatikannya dengan segera merevisi UMK kenaikan minimal 15 persen. Dengan demikian, lanjut Irsad, buruh bisa mendapat kehidupan lebih layak.

"Upah minimum di Jogja lebih rendah KHL (Kebutuhan Hidup Layak), yang kami survei itu di angka Rp3,5 juta sampai Rp4 juta (KHL). Sementara upah minimum di Yogyakarta rata-rata Rp2 juta. Masih besar pasak dari pada tiang. Gubernur harus merevisi besaran upah minimum," kata Irsad.

Dalam kesempatan tersebut, massa aksi juga meminta pasangan presiden-wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk segera mencabut UU Cipta Kerja. "Kami meminta kepada presiden yang baru, Prabowo untuk segera cabut Undang-Undang Cipta Kerja," pungkasnya. **(han)**

Layanan Pembuangan Sampah di TPA Piyungan Resmi Ditutup

YOGYA, TRIBUN - Desentralisasi pengelolaan sampah resmi diterapkan per Rabu (1/5). Penerapan ini sekaligus menutup layanan pembuangan sampah dari Kota Yogyakarta, Bantul, dan Sleman ke TPA Piyungan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Kusno Wibowo, mengatakan, seiring penerapan kebijakan desentralisasi, selanjutnya pengelolaan sampah akan dilakukan secara mandiri di kota/kabupaten masing-masing.

"Per hari ini, Rabu (1/5) (kemarin), DLHK (dinas lingkungan hidup dan kehutanan) tidak ada layanan pengangkutan sampah ke TPA Piyungan. Setelah desentralisasi sampah, kan jadi tanggung jawab kabupaten kota," ujar Kusno, kemarin.

Nantinya penyelesaian sampah jadi tanggung jawab masing-masing wilayah. "Tentu kalau ada kendala dan mereka tidak bisa menyelesaikan akan ada komunikasi balik dengan kami yang ada di Pemda DIY," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, rencana penutupan TPA Piyungan secara permanen sebelumnya telah disampaikan Pemda DIY pada 5 Maret 2024. Adapun penutupan TPA Piyungan dilakukan lantaran kapasitas zona transisi seluas 2,5 hektare sudah penuh. Pada Juli 2023 lalu, Pemda DIY juga telah menutup zona utama TPA Piyungan seluas 10 hektare lantaran penuh kapasitasnya.

Lebih lanjut, Kusno menga-

DESENTRALISASI
● Desentralisasi pengelolaan sampah resmi diterapkan per Rabu (1/5).
● Otomatis layanan pembuangan sampah dari Kota Yogyakarta, Bantul, dan Sleman ke TPA Piyungan, ditutup.
● Pemda DIY anggar Rp11 miliar untuk pembangunan pagar beton TPA Piyungan.

takan, setelah desentralisasi diberlakukan, Pemda DIY akan fokus pada penataan di TPA Piyungan. "Karena kapasitas di TPA Piyungan sudah tidak memungkinkan lagi kalau harus ditambah terus dari kabupaten/kota. Kami khawatir TPA bisa jebol, bisa membahayakan masyarakat sekitar. Menurut hitung-hitungan matematika kami sementara cukup, kami tata dulu," ujarnya.

Sejauh ini, Kusno belum dapat mengungkapkan setelah penataan ini, digunakan

untuk apa TPA Piyungan. Dia menyebut akan ada kajian lebih lanjut nantinya. "Nanti kalau ke depan tentu akan ada kajian dulu. Apakah nanti itu edukasi, eduwisata nanti itu akan dikaji mudah-mudahan bisa ditahun ini atau awal tahun depan," kata Kusno.

Disinggung apakah kabupaten/kota akan sanggup ketika dilakukan desentralisasi pengelolaan sampah, Kusno meyakini kabupaten/kota akan mampu. Dia mengungkapkan selama ini pihaknya telah berkoordinasi dengan kabupaten/kota. Terlebih, rencana desentralisasi ini sudah direncanakan sejak lama. "Desentralisasi sudah Oktober tahun kemarin (direncanakan), sampai berlakunya (Mei) sudah setengah tahun. Itu kan transisi persiapan kabupaten/kota menuju desentralisasi. Kami yakini kabupaten/kota mampu," ucap Kusno.

Apabila nantinya ada penumpukan di jalan-jalan, dikatakan Kusno hal tersebut juga menjadi tanggung jawab dari kabupaten/kota. Meski begitu dari DLHK DIY juga ti-

dak akan lepas tangan.

Pagar beton
Dikonfirmasi terpisah, Kepala DPUP-ESDM DIY, Anna Rina Herbranti, mengungkapkan bahwa Pemda DIY telah menganggarkan Rp11 Miliar dari APBD DIY untuk membangun pagar beton yang mengelilingi TPA Piyungan.

Menurutnya, pemagaran TPA Piyungan dilakukan untuk mengamankan aset yang dimiliki Pemda DIY. "Kalau kami tutup aset dengan tutup pagar, sekarang masih proses pelelangan, tinggal menutup aset yang sudah ada," katanya.

Dia menjelaskan, penutupan dengan pagar beton itu mengelilingi TPST Piyungan, termasuk di lokasi pembuangan transisi dengan luasan lahan sekitar 12-13 hektare. Pagar beton itu akan menutup pagar, sekarang masih proses pelelangan, tinggal menutup aset yang sudah ada," katanya.

"Pemagaran sampai akhir tahun, Desember selesai. Setelah lelang, ini masih proses. Mungkin pertengahan Mei kontrak sampai Desember," ujarnya. **(han)**

Prioritas Sektor Lain

SEKDA DIY, Beny Suharsono, mengatakan bahwa seiring penerapan kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah maka anggaran dari Pemda DIY akan dialihkan ke sektor lain yang mendesak untuk ditanggulangi.

"Artinya urusan yang seharusnya memang menjadi kewajiban kabupaten kota ya dilakukan sebagaimana kewajibannya. Anggarannya ada kok, kecuali tidak ada, itu baru masalah. Saya akan bergeser supaya anggaran bisa fokus un-

tuk yang lebih mendasar," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Beny, Pemda DIY pun siap menjembatani dan membimbing kabupaten kota untuk menyelesaikan persoalan sampah di wilayahnya. Menurutnya, jangan sampai desentralisasi sampah hanya akan membuat metode pengolahan yang selama ini digaungkan tidak terlaksana dan menjalar ke persoalan lainnya seperti tumpukan sampah di pinggir jalan, sungai atau titik lainnya. **(han)**



COORDINASI - Rapat Koordinasi Mabi dan Pimsaka Saka Wirausaha Tingkat Daerah di kantor Dinas Koperasi dan UKM DIY, Selasa (30/4).

Dinkop UKM DIY Dorong Pentingnya Branding dan Ekosistem Saka Wirausaha

YOGYA, TRIBUN - Saka Wirausaha merupakan salah inovasi Pemerintah Daerah (Pemda) DIY melalui Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk menumbuhkan wirausaha baru. Pengurus Saka Wirausaha pun telah dibentuk dan dilantik sejak 2023 lalu.

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY sekaligus Majelis Pembimbing Saka Wirausaha DIY, Srie Nurkyatsiwi, perjalanan satu tahun Saka Wirausaha perlu dievaluasi untuk melihat proses program yang selama ini ditargetkan.

"Perjalanan satu tahun ini kan melalui beberapa dinamika. Kan tidak hanya dilantik terus selesai, tetapi bagaimana ekosistemnya, pesertanya, pangkalannya. Kita juga kan sinergi dengan kwarcab (kwartir cabang) kabupaten/kota, makanya perlu koordinasi anggota sudah berapa, progresnya gimana, ketugasannya. Saka ini kan tempat penggemblengan," katanya dalam Rapat Koordinasi Mabi dan Pimsaka Saka Wirausaha Tingkat Daerah, Selasa (30/4).

Siwi menyebut branding Saka Wirausaha perlu diperkuat, terutama terkait manfaat yang didapatkan ketika bergabung menjadi Saka Wirausaha. Sebab, ada beberapa kendala yang dihadapi, yakni pelajar SMK yang menjadi sasaran Saka Wirausaha masih ragu.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya ekosistem dalam mengembangkan Saka Wirausaha. Menurut dia, perlu adanya kesamaan pemikiran antara kwarcab kabupaten/kota dengan OPD di kabupaten/kota.

"Seperti kita OPD kan birokrasi di Pemda DIY, kalau bicara kesakaan kan bagian dari kwarda Saka nggak bisa langsung dari provinsi, kabupaten/kota sudah mendirikan, diresmikan Saka Wirausaha di kwarcab masing-masing. Nah, kita harus mengonsolidasikan, sehingga kebijakan di provinsi bisa menjadi panduan," terangnya.

Sebagai satu-satunya Saka Wirausaha di Indonesia, inovasi ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain.

Sementara itu, Pimpinan Saka Wirausaha Tingkat Daerah DIY sekaligus Kabid Kewirausahaan Dinkop UKM DIY, Wisnu Hermawan, mengatakan, tahun ini ada dua segmen pengembangan Saka Wirausaha. Pertama, pengembangan di tingkat kabupaten/kota dan di DIY.

Saat ini, pihaknya tengah fokus pada aktivasi pangkalan Saka Wirausaha di kabupaten/kota di DIY. Sosialisasi, menjadi salah satu kegiatan yang terus dilakukan. Selain itu, pihaknya juga melakukan rekrutmen, orientasi, pelatihan, hingga inkubasi.

"Harapannya semua kabupaten/kota sudah aktivasi pangkalan Saka Wirausaha. Kami dukung agar kwarcab dan OPD kabupaten/kota untuk penumbuhan pangkalan Saka Wirausaha. Melalui Saka Wirausaha, harapannya Dinas koperasi kabupaten/kota memiliki kader yang mampu menyebarkan virus wirausaha ke institusi di wilayah, SMK, gugus depan, kwarcab. Dan menjadi ekosistem yang nantinya bisa terus dikembangkan," ujarnya. **(maw/ord)**



Mendampingi Anak untuk Merdeka Belajar

Kita baru saja memperingati Hari Pendidikan Nasional. Tema peringatan pada tahun 2024 adalah "Bergerak Bersama, Lanjutkan Merdeka Belajar." Maka penting bagi kita untuk memahami apa dan bagaimana merdeka belajar.

Merdeka belajar adalah kebijakan pendidikan yang memberi kebebasan (kemerdekaan) kepada guru dan murid untuk berfikir, bereksplorasi, dan berkreasi dalam kerangka pendidikan. Jabaran konsep merdeka belajar dituangkan dalam kurikulum merdeka.

Dalam kurikulum merdeka pembelajaran intrakurikuler dilaksanakan secara bervariasi. Konten pembelajaran dioptimalkan sehingga murid memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Target pembelajaran yang dulu dibuat per minggu, sekarang dibuat per tahun. Dengan demikian murid tidak dijejali dengan materi yang memberatkan.

Metode pembelajaran diupayakan lebih variatif dan bersifat menantang serta menyenangkan. Isi pelajaran dibuat lebih membunmi, yaitu memiliki kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Lebih khusus lagi, materi dikaitkan dengan kehidupan riil di lingkungan setempat.

Dengan konsep seperti itu sekarang murid banyak diminta mengerjakan proyek. Mereka diminta mengerjakan tugas secara kelompok. Penugasan dalam bentuk proyek merupakan bagian dari upaya membangun Profil Pelajar Pancasila.

Melalui kerja kelompok para murid dibimbing mempraktekkan nilai-nilai Pancasila secara konkrit. Mereka berlatih menerapkan toleransi, bergotong-royong, bermusyawarah, dan bersikap adil.

Sebagian orang tua mengeluh karena sekarang anak mereka banyak mendapat tugas. Lebih dari itu, orang tua tidak bisa membuat tugas anaknya. Sekedar membantu menjawab pertanyaan pun kesulitan.

Keluhan seperti itu tidak perlu ada jika kita memahami merdeka belajar sebagaimana

dikemukakan di atas. Intinya, dalam penugasan para siswa diminta melakukan eksplorasi. Mereka diminta melakukan penjelajahan pengetahuan. Jadi misalnya jawaban mereka keliru, tentu tidak masalah. Yang penting mereka sudah berusaha.

Selanjutnya Bapak/Ibu Guru yang akan menunjukkan jawaban yang benar, berikut keterangan detailnya. Dengan cara seperti itu maka siswa menjadi punya bahan untuk bertanya dan berdiskusi dengan guru. Dengan cara seperti itu maka materi pelajaran bisa lebih lekat dalam ingatan siswa.

Dengan kata lain, metode pembelajaran dalam merdeka belajar tidak lagi hanya ceramah. Tidak boleh lagi guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Tidak boleh lagi guru mendominasi seluruh aktivitas pembelajaran. Murid harus didorong dan difasilitasi untuk aktif mengeksplorasi, aktif berkreasi, dan aktif berdiskusi.

Orang tua tidak perlu khawatir kalau pengerjaan tugas sekolah anak-anaknya belum benar. Tidak perlu risau kalau tidak mampu membantu menjawab. Biarkan saja mereka berusaha sendiri. Kalau mereka melakukan kerja kelompok, tidak perlu orang tua mencampuri diskusi mereka. Biarkan mereka berkesplorasi.

Tetapi jika anak-anak bertanya atau ingin mengajak bicara maka orang tua wajib menanggapi dengan sepenuh hati. Sekali lagi, wajib menanggapi sepenuh hati. Ini sangat penting. Momen terjadinya komunikasi antara anak dengan orang tua harus terus dijaga dan dikembangkan.

Apa pun yang ditanyakan atau diobrolkan anak, wajib direspon. Jangan sambil main HP. Di sinilah kesempatan orang tua mendidik anaknya. Di sini pula peran orang tua dalam membantu pendidikan anak, yaitu dalam menjaga kestabilan jiwanya. Orang tua harus bisa "selalu ada saat anak membutuhkan".

Jadi, dukungan orang tua kepada anak dalam merdeka belajar bukan memberi materi pelajaran. Bukan menggantikan peran guru. Peran orang tua adalah menjadi tempat mengadu, menjadi sandaran, dan menjadi andalan bagi anak.



Danang Maharsa, SE (Wakil Bupati Sleman)